| **Draf RPOJK Perubahan Ketiga POJK 72/2016** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Batang Tubuh POJK 72/2016 &**  **POJK 6/2023** | **RPOJK** | **Penjelasan** | **Instansi/**  **Satuan Kerja** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 72/POJK.05/2016  TENTANG  KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI  DENGAN PRINSIP SYARIAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, | RANCANGAN  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR ... TAHUN 2025  TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI  DENGAN PRINSIP SYARIAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Menimbang: |  |  |  |  |
| 1. bahwa dalam mengelola risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian; | 1. bahwa setiap penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung akan menyebabkan pihak tersebut menjadi pihak terkait dari perusahaan; |  |  |  |
| 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan untuk melakukan mitigasi risiko atas penempatan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait dengan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dalam menanggung risiko, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi; | 1. bahwa diversifikasi investasi dibutuhkan untuk menghindari risiko konsentrasi aset perusahaan, dengan tetap memperhatikan dukungan dan keberlanjutan dari lembaga jasa keuangan; |  |  |  |
|  | 1. bahwa untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat diperlukan pengaturan yang komprehensif terhadap investasi penyertaan langsung dan investasi pada pihak terkait perusahaan; |  |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah; | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Mengingat: | Mengingat: |  |  |  |
| Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); | Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
|  | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Memutuskan: |  |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH. | PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB I |  |  |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 1 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari perusahaan reasuransi. |  |  |  |  |  |
| 1. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. |  |  |  |  |  |
| 1. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit. |  |  |  |  |  |
| 1. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. |  |  |  |  |  |
| 1. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para Pihak sesuai prinsip syariah. |  |  |  |  |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. *Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana *tabarru’* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. |  |  |  |  |  |
| 1. *Dana Tabarru’* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi *tanahud*, hasil investasi dana *tanahud*, *qardh* dari Dana Perusahaan kepada dana *tanahud*, dan/atau dana *tanahud* dari reasuradur, yang penggunaannya sesuai dengan akad hibah dana *tanahud*. |  |  |  |  |  |
| 1. Dana Perusahaan adalah kumpulan dana yang dikelola Perusahaan, selain Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, dan dana investasi peserta. |  |  |  |  |  |
| 1. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi pemegang polis atau peserta pada produk asuransi syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran dana yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana. |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas. |  |  |  |  |  |
| 1. *Qardh* adalah pinjaman dari Dana Perusahaan kepada Dana *Tabarru’* dan/atau Dana *Tanahud* dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan aset Dana *Tabarru’* dan/atau Dana *Tanahud* untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta. |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* adalah bagian dari Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan yang disediakan untuk memberi *Qardh* kepada Dana *Tabarru’* dan/atau Dana *Tanahud.* |  |  |  |  |  |
| 1. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari Dana Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat DTMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*. |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* dikurangi dengan Liabilitas dari pengelolaan Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud.* |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dikurangi dengan Liabilitas dari pengelolaan Dana Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. |  |  |  |  |  |
| 1. *Medium Term Notes Syariah* yang selanjutnya disingkat MTN Syariah adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh perusahaan tanpa melalui penawaran umum dan memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. |  |  |  |  |  |
| 1. Kontribusi Neto adalah kontribusi yang dialokasikan untuk Dana *Tabarru’* dikurangi kontribusi *tabarru’* reasuransi keluar ditambah kontribusi *tabarru’* reasuransi diterima. |  |  |  |  |  |
| 1. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi. |  |  |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Bank Umum Syariah adalah bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah bank perekonomian rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Bank Kustodian adalah bank umum dan Bank Umum Syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian. |  |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Kelompok Penerima Investasi adalah 2 (dua) atau lebih orang dan/atau perusahaan yang saling memiliki hubungan pengendalian melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang menerima dana dari Perusahaan dan/atau menerbitkan surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan, dalam rangka investasi Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB II |  |  |  |  |  |
| PEMISAHAN ASET DAN LIABILITAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 2 |  |  |  |  |  |
| 1. Aset dan Liabilitas yang terkait dengan hak pemegang polis atau peserta wajib dipisahkan dari aset dan Liabilitas yang lain dari Perusahaan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pemisahan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib membuat pencatatanterpisah untuk Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipisahkan berdasarkan jenis produk asuransi syariah. |  | Yang dimaksud “dipisahkan berdasarkan jenis produk asuransi syariah” antara lain:   1. aset dan liabilitas Dana Investasi Peserta dari Subdana dipisahkan dari aset dan liabilitas Dana Investasi Peserta dari produk asuransi syariah lain yang memberikan manfaat berupa pembayaran dana yang besarnya didasarkan pada hasil pengembangan dana, dan 2. aset dan liabilitas Dana Investasi Peserta yang dikelola berdasarkan akad wakalah bil ujrah dipisahkan dari aset dan liabilitas Dana Investasi Peserta yang dikelola berdasarkan akad *mudharabah* dan *mudaharabah musytarakah.* |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan PAYDI dengan membentuk lebih dari 1 (satu) Subdana maka: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada PAYDI wajib dipisahkan untuk masing-masing Subdana yang dibentuk Perusahaan Asuransi Syariah; |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi Syariah dilarang mengalihkan aset dan liabilitas dari satu Subdana kepada Subdana lain yang dibentuk Perusahaan Asuransi Syariah; dan |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi Syariah wajib mengelola bagian kontribusi yang ditujukan untuk memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi, sesuai dengan Subdana yang dipilih pemegang polis atau peserta. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi Syariah dilarang mengalihkan aset dan liabilitas Subdana kepada aset dan Liabilitas selain Subdana, atau sebaliknya. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Larangan pengalihan aset dan Liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikecualikan untuk pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain yang dilakukan untuk penyesuaian portofolio investasi Subdana yang tidak merugikan pemegang polis atau peserta. |  | Yang dimaksud dengan "tidak merugikan pemegang polis atau peserta" apabila pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain dilakukan dengan harga wajar, diikuti dengan pengalihan aset dari Subdana lain kepada Subdana yang bersangkutan dengan harga wajar yang sama, dan didasarkan pada analisis Perusahaan bahwa aset yang dialihkan tidak dalam masalah hukum dan/atau penurunan kinerja investasi.  Contoh 1:  Subdana 1 (satu) memiliki investasi pada saham syariah A yang melebihi batasan maksimum investasi pada satu pihak sedangkan Subdana 2 (dua) belum memiliki investasi pada saham syariah A. Perusahaan mengalihkan sebagian investasi pada saham A dari Subdana 1 (satu) kepada Subdana 2 (dua) dengan harga wajar pada waktu dengan diikuti pengalihan aset berupa deposito syariah dari Subdana 2 (dua) kepada Subdana 1 (satu) dengan nilai yang sama. Sebelum dilakukan pengalihan aset, Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada saham syariah A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada saham syariah A. Contoh 2:  Subdana 1 (satu) membutuhkan likuiditas sedangkan Subdana 2 (dua) memiliki likuiditas yang cukup, maka Perusahaan mengalihkan sebagian aset kas/bank dari Subdana 2 (dua) kepada Subdana 1 (satu) dengan diikuti pengalihan sukuk atau obligasi syariah A dari Subdana 1 (satu) kepada Subdana 2 (dua) dengan menggunakan nilai wajar. Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada obligasi syariah A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada obligasi A. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 3 |  |  |  |  |  |
| 1. Aset dan Liabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan aset dan Liabilitas para pemegang polis atau peserta secara kolektif. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dapat membentuk Dana Tabarru’ untuk setiap lini usaha. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan harus mempertahankan Aset Yang Diperkenankan dalam Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* dengan nilai paling sedikit sebesar Liabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal pembentukan Dana *Tabarru’* untuk setiap lini usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi hukum jumlah bilangan besar, Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru’* secara gabungan dari beberapa lini usaha. |  | Penggabungan Dana *Tabarru’* harus tetap memperhatikan karakteristik produk asuransi syariah. Sebagai contoh, Dana *Tabarru’* dari produk asuransi syariah yang memberikan pembagian *Surplus Underwriting* kepada pemegang polis atau peserta tidak dapat digabungkan dengan Dana *Tabarru’* dari produk asuransi syariah yang tidak memberikan pembagian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru’* kepada pemegang polis atau peserta. |  |  |  |
| 1. Penggabungan Dana Tabarru’ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diinformasikan oleh Perusahaan kepada pemegang polis atau peserta dan dimuat di dalam polis. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pembentukan Dana *Tabarru’* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau penggabungan Dana *Tabarru’* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan aktuaris Perusahaan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 4 |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan membentuk lebih dari satu Dana *Tabarru’*, setiap penerimaan dan beban Dana *Tabarru’* harus dibukukan pada masing-masing Dana *Tabarru’*. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan hanya dapat menggunakan Dana *Tabarru’* untuk: |  |  |  |  |  |
| 1. pembayaran santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta yang mengalami musibah atau Pihak lain yang berhak berdasarkan polis asuransi syariah; |  | Pembayaran santunan yang tidak berdasarkan polis asuransi syariah, misalnya pembayaran klaim *exgratia*, tidak dapat dibayarkan dari Dana *Tabarru’* namun dapat dibayarkan dari Dana Perusahaan. |  |  |  |
| 1. pembayaran kontribusi *tabarru’* kepada reasuradur; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pembayaran kembali *Qardh* kepada Perusahaan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pengembalian Dana *Tabarru’*; dan/atau |  | Pengembalian Dana *Tabarru’* diberikan kepada pemegang polis atau peserta yang membayar kontribusi. |  |  |  |
| 1. biaya terkait pengelolaan aset Dana *Tabarru’*. |  | Contoh biaya pengelolaan aset Dana *Tabarru’* adalah biaya administrasi rekening, biaya meterai, dan pajak atas hasil investasi. |  |  |  |
| 1. Pengembalian Dana *Tabarru’* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan sebagai akibat dari: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pembatalan polis dalam tenggang waktu yang diperkenankan (*freelook period*); |  |  |  |  |  |
| 1. penghentian polis oleh pemegang polis atau peserta sebelum masa asuransi berakhir; |  |  |  |  |  |
| 1. penghentian polis oleh Perusahaan sebelum masa asuransi berakhir; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. pembayaran kontribusi Dana *Tabarru’* yang lebih besar dari seharusnya. |  |  |  |  |  |
| 1. Pengembalian Dana *Tabarru’* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan kondisi penyebab pengembalian Dana *Tabarru’* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat di dalam polis. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 5 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pemegang polis atau peserta merupakan aset dan Liabilitas masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib membentuk Dana Investasi Peserta yang diklasifikasikan berdasarkan jenis Akad pengelolaan investasi yang digunakan dan jenis portofolio investasi. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan akan menawarkan jenis portofolio investasi baru, Perusahaan wajib menginformasikan kepada pemegang polis atau peserta mengenai pembentukan Dana Investasi Peserta untuk jenis portofolio investasi baru dimaksud. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB III |  |  |  |  |  |
| *SURPLUS UNDERWRITING* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 6 |  |  |  |  |  |
| 1. *Surplus Underwriting* dapat didistribusikan dengan pilihan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru’*; |  |  |  |  |  |
| 1. sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru’* dan sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta; atau |  |  |  |  |  |
| 1. sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru’*, sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta, dan sebagian dibagikan kepada Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh: |  |  |  |  |  |
| 1. rekomendasi dari aktuaris Perusahaan atau tenaga ahli Perusahaan; dan |  | Rekomendasi dari aktuaris Perusahaan atau tenaga ahli Perusahaan diberikan berdasarkan analisis atas kewajaran penghitungan *Surplus Underwriting* dan dampak pembagian *Surplus Underwriting* terhadap Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*. |  |  |  |
| 1. persetujuan Dewan Pengawas Syariah. |  | Persetujuan Dewan Pengawas Syariah diberikan paling sedikit atas polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah dan prosedur atau pedoman internal perusahaan mengenai kebijakan penggunaan *Surplus Underwriting.* |  |  |  |
| 1. Pertimbangan Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan persetujuan pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Dana Perusahaan harus disajikan dalam laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pemegang polis atau peserta yang menerima *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan *Surplus Underwriting*; |  |  |  |  |  |
| 1. tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim; |  |  |  |  |  |
| 1. tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke *Dana Tabarru’*; dan |  |  |  |  |  |
| 1. tidak menghentikan polis (*inforce*) pada periode perhitungan *Surplus Underwriting*. |  |  |  |  |  |
| 1. Pilihan pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proporsi pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. untuk meningkatkan solvabilitas Dana *Tabarru*; dan |  |  |  |  |  |
| 1. tidak mengurangi proporsi bagian pemegang polis atau peserta. |  |  |  |  |  |
| 1. *Surplus Underwriting* yang dapat didistribusikan dihitung berdasarkan pendapatan yang telah diterima secara kas pada tanggal penghitungan *Surplus Underwriting.* |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal pendistribusian *Surplus Underwriting* kepada pemegang polis atau peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan, Perusahaan wajib mendistribusikan *Surplus Underwriting* dengan pilihan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. menambahkannya ke dalam Dana *Tabarru’*; |  |  |  |  |  |
| 1. memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; atau |  |  |  |  |  |
| 1. memanfaatkannya untuk dana sosial. |  |  |  |  |  |
| 1. Pilihan dan persyaratan pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) serta persyaratan pemegang polis atau peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dimuat di dalam polis. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 7 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang melakukan pendistribusian *Surplus Underwriting* kepada pemegang polis atau peserta atau Perusahaan dalam hal: |  |  |  |  |  |
| 1. masih terdapat *Qardh* di dalam Liabilitas Dana *Tabarru’*; |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* lebih kecil dari target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* internal; |  |  |  |  |  |
| 1. tidak memenuhi tingkat kecukupan investasi; atau |  |  |  |  |  |
| 1. pendistribusian *Surplus Underwriting* dapat mengakibatkan terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf b atau huruf c. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh *Surplus Underwriting* harus ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru’*. |  |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan syarat pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dimuat di dalam polis. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB IV |  |  |  |  |  |
| *QARDH* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 8 |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan *Qardh*. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyediakan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* pada Dana Perusahaan dalam hal: |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Solvabilitas Dana T*abarru*’ dan Dana *Tanahud* lebih kecil dari target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* internal; |  | Yang dimaksud dengan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* lebih kecil dari target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* internal pada ayat ini adalah tingkat solvabilitas sebelum memperhitungkan *Qardh* dan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagai penambah Aset yang diperkenankan Dana *Tabarru’*. |  |  |  |
| 1. Jumlah investasi dalam Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru’* lebih kecil dari jumlah penyisihan teknis dan Liabilitas pembayaran santunan/klaim/manfaat retensi sendiri dari Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. terjadi defisit *underwriting* Dana *Tabarru’*; dan/atau |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Aset Yang Tersedia Untuk Qardh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. penambah Aset Yang Diperkenankan Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*; |  |  |  |  |  |
| 1. penambahan Aset yang Diperkenankan Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* dalam penghitungan kecukupan investasi Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi; dan |  |  |  |  |  |
| 1. pengurang Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling besar sejumlah: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. nilai yang diperlukan agar Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* internal; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. nilai yang diperlukan agar Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* memenuhi ketentuan mengenai kecukupan investasi Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi. |  |  |  |  |  |
| 1. Penyediaan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan direksi atau yang setara. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Dana *Tabarru’* dan/atau Dana *Tanahud* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta atau total aset Dana *Tabarru’* dan/atau Dana *Tanahud* lebih kecil dari total Liabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana*Tanahud*, Perusahaan wajib menyetorkan *Qardh* secara tunai/kas kepada Dana *Tabarru’* untuk membayar santunan/klaim/manfaat asuransi syariah. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pengembalian *Qardh* kepada Dana Perusahaan dilakukan dari Dana *Tabarru’* dan/atau Dana T*anahud*. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan Perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan *Qardh*. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB V |  |  |  |  |  |
| KESEHATAN KEUANGAN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |  |  |
| Ruang Lingkup Kesehatan Keuangan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 9 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Untuk memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemegang polis dan peserta, Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Pengukuran tingkat kesehatan keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*; |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan; |  |  |  |  |  |
| 1. penyisihan teknis; |  |  |  |  |  |
| 1. kecukupan investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. Ekuitas; |  |  |  |  |  |
| 1. Dana Jaminan; |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan; |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Dana Investasi Peserta; dan |  |  |  |  |  |
| 1. ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f hanya berlaku untuk Perusahaan Asuransi Syariah yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |  |  |
| Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana Tanahud serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 10 |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan setiap saat wajib memenuhi: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari DTMBR; dan |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari MMBR. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* internal serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* internal serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah masing-masing sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari DTMBR dan 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR dengan memperhitungkan profil risiko setiap Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test).* |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk meningkatkan dan memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* internal serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan profil risiko Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*). |  | Profil risiko Perusahaan yang mungkin timbul antara lain dari rencana perubahan strategi dan/atau pengembangan bisnis Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*). Selain itu Perusahaan dapat mempertimbangkan letak geografis, produk perusahaan, rencana bisnis, pengalaman klaim (*claim experience*) dalam mengukur profil risiko. |  |  |  |
| 1. Perusahaan setiap saat harus memenuhi Target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* internal dan target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* internal serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 11 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Batasan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diberlakukan dengan tahapan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. paling lambat 31 Desember 2017, Perusahaan wajib: |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan masing-masing paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari DTMBR dan 60% (enam puluh persen) dari MMBR; dan |  |  |  |  |  |
| 1. menetapkan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* internal serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal masing-masing paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari DTMBR dan 80% (delapan puluh persen) dari MMBR. |  |  |  |  |  |
| 1. paling lambat 31 Desember 2018, Perusahaan wajib: |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan masing-masing paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari DTMBR dan 80% (delapan puluh persen) dari MMBR; dan |  |  |  |  |  |
| 1. menetapkan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* internal serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal masing-masing paling sedikit 100% (seratus persen) dari DTMBR dan 100% (seratus persen) dari MMBR. |  |  |  |  |  |
| 1. paling lambat 31 Desember 2019, Perusahaan wajib: |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan masing-masing paling sedikit 100% (seratus persen) dari DTMBR dan 100%(seratus persen) dari MMBR; dan |  |  |  |  |  |
| 1. menetapkan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana T*anahud* internal serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal masingmasing paling sedikit 120% (seratus dua puluh persen) dari DTMBR dan 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 12 |  |  |  |  |  |
| 1. Perhitungan DTMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari: |  | Risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar merupakan bagian dari risiko aset dan Liabilitas yang terdapat dalam penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |  |
| 1. risiko kredit; |  |  |  |  |  |
| 1. risiko likuiditas; |  |  |  |  |  |
| 1. risiko pasar; |  |  |  |  |  |
| 1. risiko asuransi; dan |  |  |  |  |  |
| 1. risiko operasional. |  |  |  |  |  |
| 1. Perhitungan MMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. risiko kredit; |  |  |  |  |  |
| 1. risiko likuiditas; |  |  |  |  |  |
| 1. risiko pasar; dan |  |  |  |  |  |
| 1. risiko operasional. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan PAYDI, MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditambah sebesar persentase tertentu dari dana investasi yang bersumber dari Subdana. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh OJK. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |  |  |
| Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 13 |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi. |  | Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan, serta kesesuaian portofolio investasi dengan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis: |  |  |  |  |  |
| 1. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum; |  | Yang dimaksud dengan “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan Prinsip Syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. |  |  |  |
| 1. saham syariah yang tercatat di bursa efek; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek; |  | Yang dimaksud dengan “sukuk atau obligasi syariah” adalah sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan oleh badan usaha, termasuk lembaga yang dibentuk dan/atau diberikan kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan investasi pemerintah pusat. |  |  |  |
| 1. MTN Syariah; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. reksa dana syariah; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. efek beragun aset syariah; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. transaksi surat berharga syariah melalui *repurchase agreement* (REPO); |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*); |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. emas murni; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. sukuk daerah; dan/atau |  | Yang dimaksud dengan “sukuk daerah” adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman daerah. |  |  |  |
| 1. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. |  | Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi. |  |  |  |
| 1. Selain jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aset yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dalam bentuk investasi dapat juga ditempatkan pada: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek dan bidang usahanya tidak melanggar Prinsip Syariah; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi. |  |  |  |  |  |
| 1. dihapus. |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. saham syariah yang tercatat di bursa efek; |  |  |  |  |  |
| 1. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek; |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; |  |  |  |  |  |
| 1. reksa dana syariah; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek dan bidang usahanya tidak melanggar Prinsip Syariah. |  |  |  |  |  |
| 1. Dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 14 |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c di dalam negeri, harus termasuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit daftar efek syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| (1A) Dalam hal saham syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi termasuk dalam daftar efek syariah, saham syariah tersebut hanya dapat diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tidak tercantum dalam daftar efek syariah. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d harus dilakukan pada sukuk atau obligasi syariah yang memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK. |  | Yang dimaksud dengan “*invesment grade*” adalah kelayakan yang diberikan kepada jenis investasi yang dikeluarkan perusahaan yang mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK atau setara BBB. |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dalam MTN Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. MTN Syariah terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. MTN Syariah memiliki agen *monitoring* yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK; |  |  |  |  |  |
| 1. MTN Syariah memiliki peringkat AAA atau peringkat investasi tertinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; |  |  |  |  |  |
| 1. MTN Syariah dijamin/ditanggung dengan jaminan/ penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal MTN Syariah; dan |  |  |  |  |  |
| 1. MTN Syariah diterbitkan oleh badan usaha milik negara atau lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional; |  |  |  |  |  |
| 1. dijual melalui penawaran umum; dan |  |  |  |  |  |
| 1. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bagi reksa dana syariah yang ditawarkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan |  |  |  |  |  |
| 1. bagi reksa dana penyertaan terbatas syariah, hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan ketentuan penempatan investasi surat berharga negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai investasi surat berharga negara bagi lembaga keuangan nonbank. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa efek beragun aset syariah dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf k dan huruf l harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan |  |  |  |  |  |
| 1. ditawarkan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang melakukan investasi pada bentuk investasi berupa *repurchase agreement* (REPO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf m harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan penilaian terakhir pada waktu penempatan investasi Perusahaan yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; |  |  |  |  |  |
| 1. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandardisasi oleh OJK; |  |  |  |  |  |
| 1. transaksi dalam bentuk beli surat berharga syariah dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan; |  |  |  |  |  |
| 1. jenis jaminan terbatas pada surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; |  |  |  |  |  |
| 1. nilai *repurchase agreement* (REPO) paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga syariah yang dijaminkan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. transaksi *repurchase agreement* (REPO) terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S4). |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf n harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. merupakan perusahaan pembiayaan syariah yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; |  |  |  |  |  |
| 1. perusahaan pembiayaan syariah dimaksud tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK pada saat dimulainya kerja sama; |  |  |  |  |  |
| 1. hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan syariah berdasarkan penilaian terakhir pada waktu penempatan investasi Perusahaan yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; dan |  |  |  |  |  |
| 1. dihapus. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf o harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan |  |  |  |  |  |
| 1. disimpan di: |  |  |  |  |  |
| 1. Bank Kustodian; |  |  |  |  |  |
| 1. Pihak lain yang memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa penitipan; atau |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan, dengan syarat diasuransikan kepada Perusahaan lain. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Perusahaan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain. |  |  |  |  |  |
| 1. Dihapus. |  | Dihapus. |  |  |  |
|  | Ayat (12) baru:  Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a wajib memenuhi ketentuan: | Perusahaan pendukung kegiatan usaha utama perasuransian antara lain perusahaan penyedia jasa untuk mendukung:   1. pengembangan produk asuransi syariah; 2. proses seleksi risiko (*underwriting*); 3. pemasaran produk asuransi syariah; dan 4. penanganan klaim. |  |  |  |
|  | 1. jumlah investasi seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas; |  |  |  |  |
|  | 1. dilakukan pada perseroan terbatas berupa lembaga jasa keuangan atau perusahaan pendukung kegiatan usaha utama perasuransian; dan |  |  |  |  |
|  | 1. mendapatkan persetujuan dari OJK. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 14A |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf p harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal; |  | Yang dimaksud dengan “prinsip syariah di pasar modal” adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. |  |  |  |
| 1. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 14B |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa: |  |  |  |  |  |
| 1. sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l3 ayat (2) huruf p mengikuti ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d; dan |  |  |  |  |  |
| 1. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q mengikuti ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf l. |  |  |  |  |  |
| 1. Dihapus. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 15 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Dalam hal sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan syariah tidak memiliki tingkat *investment grade* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) penempatan dapat dilakukan dengan ketentuan: |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah *investment grade*; dan |  |  |  |  |  |
| 1. hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan syariah berdasarkan penilaian terakhir yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 16 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa saham syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. termasuk dalam kategori saham syariah di tempat saham tersebut dicatatkan; |  |  |  |  |  |
| 1. termasuk dalam kategori saham yang aktif diperdagangkan pada bursa efek di tempat saham syariah tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bursa efek dimaksud; dan |  |  |  |  |  |
| 1. informasi mengenai emiten dan transaksi saham syariah tersebut dapat diakses di Indonesia. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional; |  |  |  |  |  |
| 1. dijual melalui penawaran umum; dan |  |  |  |  |  |
| 1. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang telah mendapatkan izin dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer Investasi berdomisili; |  |  |  |  |  |
| 1. telah mendapatkan izin/persetujuan/pendaftaran dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili dan dilakukan melalui penawaran umum; |  |  |  |  |  |
| 1. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh otoritas di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili; dan |  |  |  |  |  |
| 1. informasi mengenai reksa dana dapat diakses di Indonesia. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 17 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah dan/atau sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan d yang tercatat di bursa efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum asing, dikategorikan sebagai investasi di luar negeri. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah dan/atau sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan d yang dicatatkan di bursa efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d yang diterbitkan oleh badan hukum asing yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri. |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK atau memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional; dan |  |  |  |  |  |
| 1. dijual melalui penawaran umum. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah dan/atau sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan d berdenominasi rupiah, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 18 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang memiliki investasi di luar negeri, kecuali dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang menempatkan investasi di luar negeri masing-masing melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* dan 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal jumlah investasi di luar negeri melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan adanya kenaikan nilai investasi tersebut, Perusahaan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diketahui adanya kenaikan nilai investasi. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 19 |  |  |  |  |  |
| 1. Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* serta Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut: |  | Aset yang diperkenankan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau Bank Indonesia tidak diatur batasan investasi sehingga dapat seluruhnya diperhitungkan sebagai Aset yang Diperkenankan. |  |  |  |
| 1. investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha Syariah pada bank umum paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa deposito berjangka pada BPRS, untuk setiap BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah, untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa saham syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa MTN Syariah dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa reksa dana syariah, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa efek beragun aset syariah, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa *repurchase agreement* (REPO), untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*), untuk setiap pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; | dihapus |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title)*, atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf o; |  |  |  |  |  |
| 1. dihapus; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa sukuk daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf r, dan huruf s jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa: |  | Yang dimaksud “lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan peraturan ketentuan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat” adalah lembaga pengelola investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pengelola investasi. |  |  |  |
| 1. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d; dan |  |  |  |  |  |
| 1. MTN Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat, tidak dikenakan: |  |  |  |  |  |
| 1. batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f serta batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan |  |  |  |  |  |
| 1. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). |  |  |  |  |  |
| 1. Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi persyaratan: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan |  |  |  |  |  |
| 1. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu sukuk, obligasi syariah, dan/atau MTN Syariah yang dijamin. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 20 |  |  |  |  |  |
| 1. Batasan maksimum investasi atas aset selain Dana Investasi Peserta ditetapkan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan dari Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan qardh subordinasi. |  | Contoh:  PT Asuransi Syariah X memiliki Ekuitas sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan *qardh* subordinasi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Perusahaan memiliki investasi pada Pihak Terkait berupa obligasi syariah PT Pembiayaan X1 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), deposito pada PT Bank Syariah X2 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan saham syariah PT Bank Syariah X2 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  Dengan demikian:   * Total investasi pada Pihak Terkait = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) = Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Sedangkan persentase investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan *qardh* subordinasi = (Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ÷ Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) x 100% (seratus persen) = 11,67% (sebelas koma enam puluh tujuh persen). * Batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara presentase sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas dan *qardh* subordinasi. Adapun batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara nominal = 10% (sepuluh persen) x (Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) + Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)) = Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). * Terdapat kelebihan investasi pada Pihak Terkait, secara persentase = 11,67% (sebelas koma enam puluh tujuh persen) - 10% (sepuluh persen) = 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) atau secara nominal sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) x Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) = Rp5.010.000.000,00 (lima miliar sepuluh juta rupiah). |  |  |  |
| 1. investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, paling tinggi: |  | PT Asuransi Syariah Y memiliki total investasi sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) Perusahaan memiliki investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait berupa obligasi syariah PT Pembiayaan Y1 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), deposito pada PT Bank Syariah Y2 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan saham syariah PT Bank Syariah Y2 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  Dengan demikian:   * Total investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait = Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp5.000.000.000,00 (lima miiar rupiah) = Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah). Sedangkan persentase investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi terhadap total investasi = (Rp45. 000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) ÷ Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) x 100% (seratus persen) = 30% (tiga puluh persen). * Batasan maksimum investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait secara presentase sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi. Adapun batasan maksimum investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi secara nominal = 25% (dua puluh lima persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp37,500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah. * Terdapat kelebihan investasi pada satu Kelompok Penerima Investai yang bukan Pihak Terkait, secara persentase = 30% (tiga puluh persen) - 25% (dua puluh lima persen) = 5% (lima persen) atau secara nominal sebesar 5% (lima persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). |  |  |  |
| 1. 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*, dalam hal investasi dari Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*; dan |  |  |  |  |  |
| 1. 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi Dana Perusahaan, dalam hal investasi dari Dana Perusahaan. |  |  |  |  |  |
|  | Ayat (1a) baru  Penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (12), dikecualikan dari ketentuan perhitungan investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. *Qardh* subordinasi yang diperhitungkan untuk penetapan batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Ekuitas Perusahaan. |  | PT Asuransi X memiliki Ekuitas sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan qardh subordinasi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Adapun total investasi pada seluruh Pihak Terkait sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Dengan demikian:   * *qardh* subordinasi yang diperhitungkan dalam penentuan batasan maksimum investasi hanya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), sehingga hasil penjumlahan Ekuitas dan qardh subordinasi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)+ Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) = Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah). * batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara nominal sebesar 10% (sepuluh persen) x (Rp200000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)+ Rp 200.000.000.000,00 [dua ratus miliar rupiah]) = Rp40.000.000.000,00 [empat puluh miliar rupiah]). * persentase penempatan investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan qardh subordinasi = (Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)÷ Rp400.000.000.000,00 [empat ratus miliar rupiah]) x 100% (seratus persen) = 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen). |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi dari Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan yang menyebabkan pelanggaran batasan maksimum investasi pada: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pihak Terkait; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |  |  |
| 1. Penetapan pelanggaran batasan maksimum investasi Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut: |  | Penilaian *qardh* subordinasi Perusahaan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia. |  |  |  |
| 1. untuk investasi pada Pihak Terkait sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan pada seluruh Pihak Terkait saat penempatan investasi terhadap hasil penjumlahan ekuitas Perusahaan dan *qardh* subordinasi pada laporan bulanan terakhir sebelum penempatan investasi, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; |  | Berdasarkan laporan keuangan bulan Januari 2022, PT Asuransi Syariah X memiliki Ekuitas sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Selain itu, PT Asuransi Syariah X tidak memiliki qardh subordinasi dan investasi pada Pihak Terkait. Pada tanggal 15 Februari 2022 PT Asuransi Syariah X melakukan transaksi penempatan investasi kepada Pihak Terkait sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).  Dengan demikian:   * Persentase penempatan investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan qardh subordinasi = (Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)÷ Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) x 100% (seratus persen) = 13,33% (tiga belas koma tiga puluh tiga persen). * Pelanggaran batasan maksimum investasi = 13,33% (tiga belas koma tiga puluh tiga persen) - 10% (sepuluh persen) = 3,33% (tiga koma tiga persen). Adapun nominal pelanggaran batasan maksimum investasi pada- Pihak Terkait sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen) x Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) = Rp9.990.000.000,00 (Sembilan miliar Sembilan ratus juta rupiah). |  |  |  |
| 1. untuk investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait: |  | Berdasarkan laporan keuangan bulan Januari 2022, PT Asuransi Syariah Y memiliki total investasi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Selain itu, PT Asuransi Syariah Y hanya memiliki investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi Terkait sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pada tanggal 15 Februari 2022 PT Asuransi Syariah Y melakukan transaksi penempatan investasi kepada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).  Dengan demikian:   * Persentase penempatan investasi pada sat Pihak atau Kelompok Penerima Investas terhadap total investasi (Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) ÷ Rp150.000.000.000,00 (seratus lim puluh miliar rupiah)) x 100% (seratus persen = 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen). * Pelanggaran batasan maksimum investasi = 26,67% (dua puluh enam koma enam pulu tujuh persen) - 25% (dua puluh lima persen) 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen).   Adapun nominal pelanggaran batasa maksimum investasi pada satu Pihak ata Kelompok Penerima Investasi sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp2,5 miliar (dua miliar lima ratus juta rupiah). |  |  |  |
| 1. sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi Dana *Tabarru’* dan investasi Dana *Tanahud* pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait saat penempatan investasi terhadap jumlah investasi Dana *Tabarru’* dan investasi Dana *Tanahud*, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, untuk penempatan investasi Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*; |  |  |  |  |  |
| 1. sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi Dana Perusahaan pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait saat penempatan investasi terhadap jumlah investasi Dana Perusahaan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, untuk penempatan investasi Dana Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal investasi Perusahaan pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait melampaui batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan: |  |  |  |  |  |
| 1. penurunan Ekuitas Perusahaan dan/atau qardh subordinasi; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. perubahan nilai tukar mata uang asing; |  | Perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan peningkatan nilai tercatat pada investasi dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan pelampauan batas maksimum investasi. Sesuai standar akuntansi keuangan, penyesuaian atas nilai tukar hanya dilakukan untuk akun instrumen keuangan. |  |  |  |
| 1. perubahan nilai wajar aset; |  | Yang dimaksud dengan “perubahan nilai wajar aset” antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*). |  |  |  |
| 1. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait, satu pihak yang bukan Pihak Terkait, dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait; dan/atau |  | Penggabungan usaha, baik dalam bentuk pengambilalihan, penggabungan, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau pihak penerima investasi dapat mengakibatkan perubahan pihak yang ditetapkan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi. Dengan demikian, sebagai akibat penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan, Perusahaan harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas Kelompok Penerima Investasi berkaitan dengan batasan yang ditetapkan untuk Pihak Terkait dan/atau Kelompok Penerima Investasi. |  |  |  |
| 1. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikategorikan sebagai pelampauan batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan/atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |  | Yang dimaksud dengan perubahan ketentuan yaitu perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi, termasuk pemberlakuan Peraturan OJK ini. |  |  |  |
| 1. Pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sebagai berikut: |  | Yang dimaksud dengan laporan bulanan adalah laporan yang disampaikan Perusahaan kepada OJK secara bulanan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai laporan berkala Perusahaan. Berdasarkan laporan bulan Januari 2022 dan Februari 2022 diketahui data PT Asuransi Syariah X sebagai berikut (angka dalam miliar Rupiah):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Aset, Ekuitas, dan Liabilitas | Januari  2022 | Februari  2022 | | Investasi |  |  | | 1. Investasi pada Pihak Terkait |  |  | | Saham Syariah PT X1 | 20 | 35 | | 1. Bukan Pihak Terkait |  |  | | 1. Deposito Bank A | 160 | 160 | | 1. 2) Deposito Bank B | 150 | 150 | | 1. 3) Saham Syariah PT C | 130 | 180 | | 1. 4) Investasi pada Kelompok 2. Penerima Investasi D | 140 | 180 | | **Total Investasi** | **600** | **705** | | Non Investasi | 100 | 100 | | Total Aset | 700 | 805 | | **Ekuitas** | **200** | **305** | | Liabilitas | 500 | 500 | | Ekuitas dan Liabilitas | 700 | 805 |   Selama bulan Februari 2022 PT Asuransi Syariah X tidak melakukan penambahan investasi pada Pihak Terkait maupun bukan Pihak Terkait, sehingga perubahaan nilai investasi hanya disebabkan oleh perubahan harga dari masing-masing investasi.  Dengan demikian, terdapat pelampauan batasan maksimum investasi sebagai berikut:   1. Investasi pada Pihak Terkait   Pelampauan batasan maksimum investasi = (Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)÷ Rp305.000.000.000,00 (tiga ratus lima miliar rupiah) x 100% (seratus persen)) – 10% (sepuluh persen) = 1,48% (satu koma empat puluh delapan persen) atau secara nominal sebesar 1,48% (satu koma empat puluh delapan persen) x Rp 305.000.000.000,00 (tiga ratus lima miliar rupiah) = Rp4.514.000.000,00 (empat miliar lima ratus empat belas juta rupiah).   1. Investasi pada bukan Pihak Terkait   Investasi pada saham syariah PT C = ((Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) ÷ Rp705.000.000.000,00 (tujuh ratus lima miliar rupiah) x 100% (seratus persen)) – 25% (dua puluh lima persen) = 0,53% atau secara nominal sebesar 0,53% (nol koma lima puluh tiga persen x Rp705.000.000.000,00 (tujuh ratus lima miliar rupiah) = Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).   1. Investasi pada Kelompok Penerima Investasi D = ((Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) ÷ Rp705.000.000.000,00 (tujuh ratus lima miliar rupiah) x 100% (seratus persen)) – 25% (dua puluh lima persen) = 0,53% (nol koma lima puluh tiga persen) atau secara nominal sebesar 0,53% (nol koma lima puluh tiga persen) x Rp705 000.000.000,00 (tujuh ratus lima miliar rupiah) = Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah. |  |  |  |
| 1. untuk investasi pada Pihak Terkait sebesar selisih lebih dari persentase investasi Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan pada seluruh Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan *qardh* subordinasi pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a; |  |  |  |  |  |
| 1. untuk investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait: |  |  |  |  |  |
| 1. sebesar selisih lebih dari persentase investasi Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 1, untuk investasi Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*; |  |  |  |  |  |
| 1. sebesar selisih lebih dari persentase investasi Dana Perusahaan pada pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan ekuitas Perusahaan dan *qardh* subordinasi pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 2, untuk investasi Dana Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) huruf n, penempatan investasi tersebut hanya dapat dilakukan pada lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK dan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK. | dihapus | Dihapus. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), nominal aset dalam bentuk investasi penyertaan langsung yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tetap diperhitungkan sebagai Aset yang Diperkenankan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau terjadi pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nominal aset dalam bentuk investasi yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan dan Perusahaan wajib: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi kepada OJK; dan |  |  |  |  |  |
| 1. menyelesaikan pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. |  |  |  |  |  |
| 1. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf huruf a dan huruf b dikecualikan bagi penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7). |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh OJK. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 21 |  |  |  |  |  |
| 1. Pihak Terkait meliputi: |  |  |  |  |  |
| 1. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Perusahaan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. badan hukum dalam hal Perusahaan bertindak sebagai pengendali; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. perusahaan yang memiliki pengendali yang sama dengan Perusahaan; |  | Contoh:  PT A dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan PT Asuransi Syariah B, sehingga PT A disebut sebagai Pihak Terkait. |  |  |  |
| 1. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dan pejabat eksekutif Perusahaan; |  | Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif Perusahaan” yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional dengan kedudukan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lainnya yang setara. |  |  |  |
| 1. pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal: |  | Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:   1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; 7. suami atau istri; 8. mertua; 9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; 10. kakek atau nenek dari suami atau istri; 11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau 12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. dari perorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan |  |  |  |  |  |
| 1. dari anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; |  |  |  |  |  |
| 1. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. perusahaan yang memiliki anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara yang merupakan anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara merupakan direksi dan/atau komisaris atau yang setara dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c; |  | Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif direksi dan/atau dewan komisaris. |  |  |  |
| 1. perusahaan yang: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dan/atau pejabat eksekutif Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan |  |  |  |  |  |
| 1. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali; |  |  |  |  |  |
| 1. kontrak investasi kolektif dimana Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut, kecuali dalam hal kontrak investasi kolektif tersebut memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; | Dihapus. | Dihapus. |  |  |  |
| 1. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i; |  | Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:   1. terdapat bantuan keuangan dari Perusahaan dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Perusahaan dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima bantuan keuangan; 2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Perusahaan atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan: 3. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan 4. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau 5. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan ko-asuransi. |  |  |  |
| 1. penerima investasi berupa perorangan atau perusahaan yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; |  | Yang dimaksud dengan “jaminan” adalah janji yang diberikan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi). |  |  |  |
| 1. penerima investasi yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; dan |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. perusahaan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  | Ayat (1a) baru  Penetapan Pihak Terkait untuk penempatan investasi dalam bentuk kontrak investasi kolektif dilakukan berdasarkan *underlying asset* dari kontrak investasi kolektif. | Contoh:  Perusahaan Asuransi Syariah A terafiliasi dengan perusahaan B merupakan Pihak Terkait.  Perusahaan Asuransi Syariah A melakukan penempatan investasi pada reksa dana dimana *underlying* asetnya adalah perusahaan B sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih reksa dana.  Jika nilai aktiva bersih reksa dana tersebut diasumsikan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan Perusahan memiliki unit penyertaan sebanyak 100 (seratus) unit dari total 2000 (dua ribu) unit penyertaan maka investasi pada Pihak Terkait atas pembelian reksa dana tersebut= (100/2000)x10%xRp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). |  |  |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung: |  | Yang dimaksud dengan pengendalian secara bersamasama yaitu pengendalian bersama oleh para pemilik atas perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Pengendalian secara bersama-sama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing. Memiliki secara tidak langsung saham yaitu mengendalikan atau memiliki saham secara bersamasama atau melalui pihak lain, termasuk:   1. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali; 2. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali; 3. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali, yaitu: 4. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali; 5. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi; 6. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali; 7. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali karena perkawinan dan/atau keturunan; atau 8. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta memengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga anggota direksi, dan keluarga pengurus; 9. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali; 10. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (*saham nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu; 11. saham Perusahaan atau perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali; 12. saham perusahaan lain yang dimiliki Perusahaan melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan secara berjenjang sampai dengan perusahaan terakhir (*ultimate subsidiary*); 13. saham Perusahaan atau perusahaan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang dikendalikan oleh Perusahaan atau pengendali. |  |  |  |
| 1. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan atau perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara bersama-sama; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi Perusahaan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Perusahaan atau perusahaan lain; |  | Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan. |  |  |  |
| 1. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; dan/atau |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Perusahaan secara langsung atau tidak langsung: |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersamasama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara bersama-sama; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan lain; |  | Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan. |  |  |  |
| 1. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; dan/atau |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar; |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain; |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; |  |  |  |  |  |
| 1. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersamasama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; |  |  |  |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan lain. |  |  |  |  |  |
| 1. Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sampai dengan huruf m dikecualikan untuk: |  |  |  |  |  |
| 1. penempatan investasi Perusahaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); | penempatan investasi Perusahaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) huruf b; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan penjaminan, dan/atau perusahaan penjaminan syariah sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan |  | Pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing perusahaan. |  |  |  |
| 1. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 21A |  |  |  |  |  |
| 1. Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait meliputi: |  |  |  |  |  |
| 1. penerima investasi merupakan pengendali penerima investasi lain; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa penerima investasi; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara penerima investasi menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan lain; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. penerima investasi memiliki hubungan keuangan dengan penerima investasi lain; dan/atau |  | Hubungan keuangan antar penerima investasi dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:   1. terdapat bantuan keuangan dari satu penerima investasi kepada penerima investasi lain dengan persyaratan yang menyebabkan penerima investasi yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima investasi yang menerima bantuan keuangan; 2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha penerima investasi dengan penerima investasi lain sehingga terdapat ketergantungan antar penerima investasi yang mengakibatkan: 3. salah satu penerima investasi tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan 4. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu penerima investasi dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau 5. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana salah satu penerima investasi yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari penerima investasi yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi. |  |  |  |
| 1. 1 (satu) pihak yang sama melakukan penjaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban beberapa penerima investasi dalam hal penerima investasi gagal memenuhi kewajiban kepada kreditur. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4). |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Hubungan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pemberian jaminan oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan/atau perusahaan penjaminan, sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan |  |  |  |  |  |
| 1. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 21B |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) dikecualikan untuk pengendalian yang disebabkan kepemilikan langsung oleh Negara Republik Indonesia pada Perusahaan dan/atau pihak lain. |  |  |  |  |  |
| 1. Penghitungan jumlah investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dikecualikan untuk penempatan investasi berupa: |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat, yang dijamin oleh pemerintah pusat. |  |  |  |  |  |
|  | Huruf d baru:  kontrak investasi kolektif yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. | Kontrak investasi kolektif yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |
| 1. Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan: |  |  |  |  |  |
| 1. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan |  |  |  |  |  |
| 1. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu sukuk, obligasi syariah, dan/atau MTN Syariah yang dijamin. |  |  |  |  |  |
|  | Ayat (4) baru  Penghitungan jumlah investasi pada Pihak Terkait dikecualikan untuk penempatan investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11). | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 21C |  |  |  |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9) huruf a wajib paling sedikit memuat tindakan yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi Perusahaan, dan/atau target waktu penyelesaian. |  | Rencana tindak yang disampaikan oleh Perusahaan merupakan komitmen Perusahaan kepada OJK. |  |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9) huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling lambat: |  |  |  |  |  |
| 1. 1 (satu) bulan sejak OJK menetapkan telah terjadi pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4); atau |  |  |  |  |  |
| 1. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk pelampauan batasan maksimum investasi yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. |  |  |  |  |  |
| 1. Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), paling lambat 1 (satu) bulan; |  |  |  |  |  |
| 1. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu pihak, atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, paling lambat 9 (sembilan) bulan; atau |  |  |  |  |  |
| 1. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu pihak, atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d dan/atau huruf e, paling lambat 12 (dua belas) bulan; |  |  |  |  |  |
| sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada OJK. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan atas dasar persetujuan OJK dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi mengenai realisasi langkah yang terdapat pada rencana tindak dan hasil atau status terkahir penyelesaian pelampauan batasan investasi. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 22 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan aset Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta kepada pemegang saham atau pihak terafiliasi dengan Perusahaan kecuali melalui transaksi yang wajar (*arm’s length transaction*). |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang menjaminkan aset Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta kepada pihak lain. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang memberikan pinjaman kepada pemegang saham atau pihak terafiliasi dengan Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal pinjaman dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). |  |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pinjaman atau penempatan untuk Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 23 |  |  |  |  |  |
| Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dihitung dari: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. total investasi Dana *Tabarru’* ditambah Dana *Tanahud* untuk penghitungan batasan Aset Yang Diperkenankan pada Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*; atau |  |  |  |  |  |
| 1. total investasi Dana Perusahaan untuk penghitungan batasan Aset Yang Diperkenankan pada Dana Perusahaan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |  |  |
| Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Bukan Investasi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 24 |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi untuk ditempatkan Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* harus dalam jenis: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kas dan bank; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan kontribusi *tabarru’* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan kontribusi reasuransi; |  |  |  |  |  |
| 1. aset reasuransi *tabarru’*; |  |  |  |  |  |
| 1. aset reasuransi *tanahud*; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan klaim koasuransi; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan klaim reasuransi; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan investasi; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan hasil investasi. |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi untuk Dana Perusahaan harus dalam jenis: |  |  |  |  |  |
| 1. kas dan bank; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tagihan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tagihan *ujrah* reasuransi; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. aset reasuransi Dana Perusahaan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tagihan investasi; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tagihan hasil investasi; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*); dan/atau |  | Yang dimaksud dengan “biaya akusisi” adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi *overriding*. |  |  |  |
| 1. aset hak guna. |  | Yang dimaksud dengan “aset hak guna” adalah aset yang diakui Perusahaan berdasarkan kontrak sewa. |  |  |  |
| 1. Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di luar negeri yang diperkenankan seluruhnya paling tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas periode berjalan; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan kontribusi *tabarru’* dan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal: |  |  |  |  |  |
| 1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran kontribusi tunggal; atau |  |  |  |  |  |
| 1. jatuh tempo pembayaran kontribusi bagi polis dengan pembayaran kontribusi cicilan; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan kontribusi reasuransi dan tagihan *ujrah* reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |  |  |  |
| 1. aset reasuransi, terdiri dari: |  |  |  |  |  |
| 1. aset reasuransi pada Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang; dan |  |  |  |  |  |
| 1. aset reasuransi pada Dana Perusahaan yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) dengan ketentuan: |  |  |  |  |  |
| 1. hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya akusisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back end loading*); |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang telah mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) atas PAYDI yang sama; dan |  |  |  |  |  |
| 1. untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada pemegang polis atau peserta; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |  |  |  |
| 1. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas periode berjalan; |  |  |  |  |  |
| 1. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*), dengan ketentuan: |  |  |  |  |  |
| 1. hanya dapat dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*); |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahan yang telah mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu produk PAYDI yang sama; dan |  |  |  |  |  |
| 1. setiap pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) untuk masing-masing produk PAYDI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. aset hak guna hanya diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. |  |  |  |  |  |
| 1. Dasar penilaian setiap jenis aset bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 2 huruf c) dan huruf j angka 3 ditetapkan oleh OJK. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |  |  |
| Status Aset Yang Diperkenankan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 25 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus: |  |  |  |  |  |
| 1. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama Perusahaan dari instansi yang berwenang; |  |  |  |  |  |
| 1. tidak dalam sengketa; |  |  |  |  |  |
| 1. tidak sedang dijadikan jaminan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. tidak sedang diblokir oleh pihak yang berwenang. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |  |  |
| Liabilitas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 26 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Liabilitas yang diperhitungkan dalam penetapan perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* wajib meliputi semua Liabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* termasuk Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*. |  |  |  |  |  |
| 1. Liabilitas yang diperhitungkan dalam penetapan perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan wajib meliputi semua Liabilitas Dana Perusahaan termasuk Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib membentuk penyisihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan jenis produk asuransi. |  |  |  |  |  |
| 1. Pembentukan penyisihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh aktuaris Perusahaan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 26A |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan dapat melakukan transaksi dalam bentuk jual surat berharga bersifat utang dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*) untuk menjaga kondisi likuiditas Perusahaan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pelaksanaan transaksi dalam bentuk jual surat berharga bersifat utang dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*) sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pedoman transaksi *repurchase agreement* bagi lembaga jasa keuangan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 27 |  |  |  |  |  |
| 1. Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi: |  | Penyisihan teknis yang dimaksud dalam ayat ini termasuk atas unsur proteksi pada PAYDI. |  |  |  |
| 1. penyisihan kontribusi *tabarru’* dan *tanahud*: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis; dan |  |  |  |  |  |
| 1. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. penyisihan kontribusi *tabarru’* yang belum menjadi pendapatan atau hak atau produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. penyisihan klaim; dan |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. penyisihan atas risiko bencana (*catastrophic reserve*). |  | Yang dimaksud dengan “risiko bencana” adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Pembentukan penyisihan kontribusi *tabarru’* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran pada Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral ditambah dengan marjin risiko. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pembentukan penyisihan atas kontribusi tabarru’ yang belum merupakan pendapatan atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dihitung berdasarkan kontribusi tabarru’ dengan memperhitungkan penyisihan atas seluruh risiko yang belum dijalani (*unexpired risk reserve*). |  | Yang dimaksud dengan kontribusi *tabarru’* adalah kontribusi dari pemegang polis atau peserta yang dialokasikan ke Dana *Tabarru’*. |  |  |  |
| 1. Penyisihan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. penyisihan klaim dalam proses penyelesaian; |  |  |  |  |  |
| 1. penyisihan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR); dan |  |  |  |  |  |
| 1. penyisihan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus. |  |  |  |  |  |
| 1. Penyisihan atas risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi: |  |  |  |  |  |
| 1. penyisihan *ujrah*; dan | penyisihan *ujrah,* termasuk penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi atas pokok investasi. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi atas pokok investasi. | dihapus. | Dihapus. |  |  |  |
| 1. Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diperhitungkan dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan dengan tahapan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. mulai tanggal 1 Januari 2018 sebesar 20% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan; |  |  |  |  |  |
| 1. mulai tanggal 1 Januari 2019 sebesar 40% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan; |  |  |  |  |  |
| 1. mulai tanggal 1 Januari 2020 sebesar 60% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan; |  |  |  |  |  |
| 1. mulai tanggal 1 Januari 2021 sebesar 80% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. mulai tanggal 1 Januari 2022 sebesar 100% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 28 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal ditemukan ketidakwajaran penyisihan teknis atau bagian dari penyisihan teknis yang dibentuk oleh Perusahaan, OJK dapat: |  |  |  |  |  |
| 1. meminta Perusahaan untuk melakukan valuasi ulang atas jumlah penyisihan teknis atau atas bagian dari penyisihan teknis yang dianggap tidak wajar; atau |  |  |  |  |  |
| 1. meminta dilakukan penelaahan (*review*) atas penyisihan teknis atau atas bagian dari penyisihan teknis tersebut oleh pihak independen atas beban Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menunjuk pihak independen paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan untuk dilakukan penelaahan (review) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 29 |  |  |  |  |  |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Surat Edaran OJK. |  | Yang akan diatur dalam Surat Edaran OJK antara lain metode pembentukan untuk tiap jenis penyisihan teknis dan asumsi yang digunakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Ketujuh |  |  |  |  |  |
| *Qardh* Subordinasi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 30 |  | Yang dimaksud dengan “*qardh* subordinasi” adalah pinjaman dari pemegang saham Perusahaan kepada Dana Perusahaan dengan kewajiban pengembalian pinjaman sebesar pokok pinjaman tanpa imbalan kepada pemberi pinjaman serta dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih atas pinjaman tersebut berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada. |  |  |  |
| Dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan, *qardh* subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur Liabilitas jika *qardh* subordinasi tersebut memenuhi ketentuan: |  |  |  |  |  |
| 1. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling sedikit memuat: |  |  |  |  |  |
| 1. pembayaran pokok pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan jika tidak menyebabkan Perusahaan tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal; dan |  |  |  |  |  |
| 1. jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi. |  |  |  |  |  |
| 1. *Qardh* subordinasi diberikan dalam bentuk setoran tunai. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 31 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Perusahaan dilarang mengembalikan *Qardh* subordinasi apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kedelapan |  |  |  |  |  |
| Kecukupan Investasi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 32 |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, paling sedikit sebesar jumlah penyisihan teknis Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* retensi sendiri, ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau peserta. |  | Yang dimaksud dengan “Liabilitas lain kepada pemegang polis atau peserta” antara lain titipan kontribusi. |  |  |  |
| 1. Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Liabilitas pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB VI |  |  |  |  |  |
| DANA INVESTASI PESERTA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 33 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk investasi wajib ditempatkan pada jenis: |  |  |  |  |  |
| 1. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; |  |  |  |  |  |
| 1. sertifikat deposito pada Bank Syariah; |  |  |  |  |  |
| 1. saham syariah yang tercatat di bursa efek; |  |  |  |  |  |
| 1. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek; |  |  |  |  |  |
| 1. MTN Syariah; |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; |  |  |  |  |  |
| 1. reksa dana syariah; |  |  |  |  |  |
| 1. efek beragun aset syariah; |  |  |  |  |  |
| 1. transaksi surat berharga syariah melalui *repurchase agreement* (REPO); |  |  |  |  |  |
| 1. emas murni; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. sukuk daerah. |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis: |  |  |  |  |  |
| 1. kas dan bank; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan kontribusi Dana Investasi Peserta penutupan langsung; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan investasi; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan hasil investasi. |  |  |  |  |  |
| 1. Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada OJK dan yang dijanjikan kepada calon pemegang polis atau peserta. |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Dana Investasi Peserta yang bersumber dari PAYDI yang tidak digaransi, tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan. |  |  |  |  |  |
| 1. Dasar penilaian setiap jenis investasi atas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum bagi Perusahaan di Indonesia. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 34 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Penempatan atas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 14 sampai dengan 17. | Ayat (1) baru  Penempatan atas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: |  |  |  |  |
|  | 1. Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan ayat (9); dan |  |  |  |  |
|  | 1. Pasal 15 sampai dengan Pasal 17. |  |  |  |  |
|  | Ayat (2) baru  Dalam hal Dana Investasi Peserta ditempatkan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |
|  | 1. bagi reksa dana syariah yang ditawarkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; |  |  |  |  |
|  | 1. bagi reksa dana penyertaan terbatas, tercatat di OJK; |  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan mendapatkan laporan investasi dari manajer investasi berupa rincian seluruh *underlying asset* reksa dana syariah tersebut secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali; dan |  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan memperhitungkan *underlying asset* dari reksa dana syariah yang merupakan Pihak Terkait Perusahaan sebagai perhitungan investasi pada Pihak Terkait. |  |  |  |  |
| Pasal 34A |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk investasi wajib memenuhi batasan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan Dana Investasi Peserta paling besar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan *qardh* subordinasi. | investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan Dana Investasi Peserta paling besar 10% (sepuluh persen) dari nilai total investasi masing-masing Dana Investasi Peserta; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait paling besar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai aset bersih: |  | Yang dimaksud dengan “nilai aset bersih” adalah nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari masingmasing Subdana. |  |  |  |
| 1. masing-masing Subdana, untuk investasi dari Subdana; atau |  |  |  |  |  |
| 1. masing-masing produk asuransi syariah selain PAYDI yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada hasil pengembangan dana. |  |  |  |  |  |
| 1. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 21B. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. *Qardh* subordinasi yang diperhitungkan untuk penetapan batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Ekuitas Perusahaan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21A dan Pasal 21B. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal aset Subdana ditempatkan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j, reksa dana syariah dimaksud hanya dapat merupakan reksa dana yang memiliki aset yang mendasari (underlying asset) berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai aset bersih reksa dana dan Perusahaan memiliki informasi rincian seluruh aset yang mendasari (*underlying asset*) reksa dana tersebut. | dihapus. | Dihapus. |  |  |  |
| 1. Dalam hal penempatan aset investasi Subdana atau aset nilai tunai produk asuransi syariah selain PAYDI yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada hasil pengembangan dana, melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyesuaikan komposisi aset investasi tersebut agar memenuhi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat: |  | Yang dimaksud dengan “hari bursa” adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa efek. |  |  |  |
| 1. 10 (sepuluh) hari bursa sejak terjadinya pelanggaran batasan investasi yang disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan; atau |  |  |  |  |  |
| 1. 90 (sembilan puluh) hari bursa sejak terjadinya pelampauan batasan investasi yang tidak disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 35 |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi Subdana di luar negeri atas polis asuransi PAYDI yang menggunakan mata uang Rupiah. | dihapus. | Dihapus. |  |  |  |
| 1. Penempatan investasi di luar negeri atas Dana Investasi Peserta dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari total Dana Investasi Peserta. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 36 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menatausahakan seluruh aset Subdana pada Bank Kustodian. |  |  |  |  |  |
| 1. Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB VII |  |  |  |  |  |
| EKUITAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 37 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar: |  |  |  |  |  |
| 1. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Syariah; |  |  |  |  |  |
| 1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi Syariah. |  |  |  |  |  |
| 1. Unit Syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar: |  |  |  |  |  |
| 1. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi Unit Syariah dari perusahaan asuransi; |  |  |  |  |  |
| 1. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi Unit Syariah dari perusahaan reasuransi. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 38 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah Ekuitas di bawah ketentuan Ekuitas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. | Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah Ekuitas di bawah ketentuan Ekuitas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Peraturan OJK mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. |  |  |  |  |
| 1. Pembayaran dividen atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB VIII |  |  |  |  |  |
| DANA JAMINAN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |  |  |
| Pembentukan Dana Jaminan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 39 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. |  |  |  |  |  |
| 1. Jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi ditambah 5% (lima persen) dari penyisihan kontribusi *tabarru’* dan *tanahud*, dan penyisihan kontribusi *tabarru’* yang belum merupakan pendapatan; |  |  |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Kontribusi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari kontribusi *tabarru’* reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. bagi Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi ditambah 5% (lima persen) dari penyisihan kontribusi *tabarru’* yang belum merupakan pendapatan; |  |  |  |  |  |
| 1. bagi Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Kontribusi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari kontribusi *tabarru’* reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI. |  |  |  |  |  |
| 1. Pembentukan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Dana Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan sebesar jumlah terbesar antara hasil perhitungan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |  |  |  |
| 1. Dana Jaminan bagi Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib dipisahkan dari Dana Jaminan yang dibentuk oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi untuk usaha asuransi atau reasuransi yang tidak berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |  |  |
| 1. Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) hanya berlaku untuk Perusahaan Asuransi Syariah yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis, Perusahaan Reasuransi, dan Unit Syariah. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 40 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Jumlah penyisihan kontribusi *tabarru’* dan *tanahud*, penyisihan kontribusi *tabarru’* yang belum merupakan pendapatan, penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi, Kontribusi Neto, dan kontribusi *tabarru’* reasuransi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diperoleh dari laporan keuangan per 31 Desember yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Jaminan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), Perusahaan wajib menambah Dana Jaminan yang dimilikinya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 April tahun berjalan. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), Perusahaan dapat mengurangi Dana Jaminan yang dimilikinya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK. |  |  |  |  |  |
| 1. Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) wajib ditempatkan dalam bentuk: |  |  |  |  |  |
| 1. deposito dengan perpanjangan otomatis pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum yang bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang pada saat penempatan sebagai Dana Jaminan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun. |  |  |  |  |  |
| 1. Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |  |  |
| Penatausahaan Dana Jaminan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 41 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menatausahakan seluruh Dana Jaminan pada Bank Kustodian. |  |  |  |  |  |
| 1. Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 42 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Penatausahaan Dana Jaminan pada Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank Kustodian yang paling sedikit memuat: |  |  |  |  |  |
| 1. pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan kepada Bank Kustodian untuk mencairkan, memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan dari OJK; |  |  |  |  |  |
| 1. kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana yang diperoleh dari pencarian Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum atas nama Perusahaan, dalam hal Perusahaan belum melakukan penggantian Dana Jaminan yang telah jatuh tempo dimaksud; |  |  |  |  |  |
| 1. ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan penyerahan deposito atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai Dana Jaminan, kecuali telah mendapat persetujuan OJK; dan |  |  |  |  |  |
| 1. ketentuan bahwa Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan penatausahaan Dana Jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan kepada OJK paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya yang paling sedikit memuat: |  |  |  |  |  |
| 1. nama Perusahaan pemilik Dana Jaminan; |  |  |  |  |  |
| 1. jenis Dana Jaminan; |  |  |  |  |  |
| 1. nomor bilyet dan Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum penerbit untuk deposito; |  |  |  |  |  |
| 1. seri dari surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. nilai nominal Dana Jaminan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. tanggal jatuh tempo. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |  |  |
| Perubahan Dana Jaminan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 43 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dapat melakukan perubahan Dana Jaminan berupa pembentukan, penambahan, penggantian, pemindahan, dan/atau pencairan Dana Jaminan. |  |  |  |  |  |
| 1. Pembentukan atau penambahan Dana Jaminan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. penempatan baru deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagai Dana Jaminan; |  |  |  |  |  |
| 1. penempatan deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. penempatan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan dapat melakukan pemindahan atau penggantian Dana Jaminan dengan ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. dari deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum menjadi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau sebaliknya; |  |  |  |  |  |
| 1. mengubah jangka waktu deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum; |  |  |  |  |  |
| 1. mengubah Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum tempat penempatan deposito; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. menukarkan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan akan melakukan pemindahan atau penggantian Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan pengganti paling sedikit sebesar nilai Dana Jaminan yang akan dipindah atau diganti. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo, Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan baru paling sedikit sebesar nilai surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo dimaksud, paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan dapat mencairkan Dana Jaminan dalam hal jumlah Dana Jaminan telah melebihi dari jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2). |  |  |  |  |  |
| 1. Jumlah Dana Jaminan yang dapat dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah selisih lebih dari jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2). |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan hanya dapat melakukan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan OJK. |  |  |  |  |  |
| 1. Pemindahan atau pencairan Dana Jaminan dilakukan dengan menyampaikan dokumen permohonan yang paling sedikit memuat: |  |  |  |  |  |
| 1. alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan; |  |  |  |  |  |
| 1. persetujuan direksi atau yang setara atas pemindahan atau pencairan Dana Jaminan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. dokumen pendukung yang membuktikan alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 44 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. OJK dapat memerintahkan Perusahaan untuk menambah jumlah Dana Jaminan paling tinggi sebesar jumlah penyisihan teknis, dalam hal: |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menambah jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak diperintahkan untuk menambah jumlah Dana Jaminan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB IX |  |  |  |  |  |
| PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 45 |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyusun: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; |  |  |  |  |  |
| 1. dihapus; |  |  |  |  |  |
| 1. laporan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. |  |  |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK; dan |  |  |  |  |  |
| 1. mendapat pengesahan rapat umum pemegang saham. |  |  |  |  |  |
| (2A) Dalam hal akuntan publik memberikan *management letter* kepada Perusahaan, laporan keuangan tahunan wajib dilengkapi dengan *management letter*. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus ditandatangani oleh aktuaris Perusahaan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: |  |  |  |  |  |
| 1. profil Perusahaan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. surat pernyataan direksi atau yang setara; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. dihapus; |  | Dihapus. |  |  |  |
| 1. laporan posisi keuangan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan laba/rugi komprehensif; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan arus kas; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan perubahan Ekuitas; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan Tingkat Solvabilitas; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. perhitungan aset dan Liabilitas; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan keuangan PAYDI; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan keuangan gabungan; dan |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan tambahan. |  | Yang dimaksud dengan “laporan tambahan” antara lain laporan mengenai Dana Jaminan, rasio kesehatan selain DTMBR dan MMBR, rasio pendidikan dan pelatihan, dan laporan lainnya. |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh OJK. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 45A |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, untuk: |  |  |  |  |  |
| 1. investasi dari Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan |  |  |  |  |  |
| 1. investasi dari Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1). |  |  |  |  |  |
| 1. Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nama Pihak Terkait dan hubungan antara Pihak Terkait dan Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Daftar rincian Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nama Pihak, nama Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dan hubungan antara Pihak dengan Pihak lain dalam Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK: |  |  |  |  |  |
| 1. laporan daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang menerima investasi Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, atau Dana Investasi Peserta, dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini; |  |  |  |  |  |
| 1. laporan penempatan investasi pada: |  |  |  |  |  |
| 1. Pihak Terkait; |  |  |  |  |  |
| 1. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; dan |  |  |  |  |  |
| 1. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, yang menerima investasi dari Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. |  |  |  |  |  |
| 1. laporan penempatan investasi pada: |  |  |  |  |  |
| 1. Pihak Terkait; |  |  |  |  |  |
| 1. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; dan |  |  |  |  |  |
| 1. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, yang menerima investasi dari Dana Perusahaan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. |  |  |  |  |  |
| 1. laporan penempatan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait yang menerima investasi dari Dana Investasi Peserta dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. |  |  |  |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan secara: |  |  |  |  |  |
| 1. setiap bulan sebagai bagian dari laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d; dan |  |  |  |  |  |
| 1. sesuai dengan batas waktu yang diminta OJK apabila OJK meminta Perusahaan menyampaikan laporan tersebut. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 46 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan Prinsip Syariah wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a secara terpisah dari laporan keuangan tahunan untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi yang tidak berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 47 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), setiap aset dan Liabilitas dalam satuan mata uang asing wajib disajikan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal laporan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |  |  |
| Penyampaian Laporan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 48 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK: |  |  |  |  |  |
| 1. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e paling lambat 30 April tahun berikutnya; |  |  |  |  |  |
| 1. dihapus; |  |  |  |  |  |
| 1. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan |  |  |  |  |  |
| 1. laporan hasil penelaahan dan penilaian kewajaran penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) paling lambat 30 Juni tahun berikutnya setelah periode laporan aktuaris yang dilakukan penelaahan dan penilaian. |  |  |  |  |  |
| 1. Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud. |  |  |  |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilengkapi dengan pernyataan Dewan Pengawas Syariah bahwa pengelolaan aset dan Liabilitas telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |  |  |
| Pengumuman Laporan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 49 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) pada situs web Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a yang memuat paling sedikit: |  |  |  |  |  |
| 1. posisi keuangan; |  |  |  |  |  |
| 1. kinerja keuangan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. kondisi kesehatan keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d pada situs web Perusahaan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan. |  |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai bentuk dan susunan ringkasan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK. |  |  |  |  |  |
| 1. Bentuk dan susunan ringkasan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 50 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Dalam hal terdapat bagian yang perlu dikoreksi dalam laporan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3), Perusahaan wajib mengoreksi laporan tersebut dan mengumumkan kembali pada situs web Perusahaan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB X |  |  |  |  |  |
| RENCANA PENYEHATAN KEUANGAN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 51 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* internal dan/atau target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4): |  |  |  |  |  |
| 1. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham. |  |  |  |  |  |
| 1. Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari rencana tindak dan/atau rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 52 |  |  |  |  |  |
| Dihapus. |  | Dihapus. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 53 |  |  |  |  |  |
| Dihapus. |  | Dihapus. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 54 |  | Dihapus. |  |  |  |
| Dihapus. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 55 |  |  |  |  |  |
| Dihapus. |  | Dihapus. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB XA |  |  |  |  |  |
| KEBIJAKAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TERDAMPAK BENCANA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 55A |  | Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan, dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. |  |  |  |
| 1. OJK berwenang menetapkan kebijakan di bidang perasuransian yang bertujuan mengurangi tekanan, menjaga stabilitas industri asuransi dan memberikan relaksasi kepada pelaku industri asuransi yang terdampak bencana. |  |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan OJK berupa kebijakan untuk mengurangi tekanan dan menjaga stabilitas industri asuransi serta bentuk pemberian relaksasi kepada pelaku industri asuransi yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB XI |  |  |  |  |  |
| SANKSI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 56 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 5 ayat (2), ayat (3), Pasal 6 ayat (5), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 11, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), dan ayat (9), Pasal 21C ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34, Pasal 34A ayat (1) dan ayat (6), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (2A), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 45A ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50, dan/atau Pasal 51 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: | Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 5 ayat (2), ayat (3), Pasal 6 ayat (5), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 11, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (12), Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), dan ayat (9), Pasal 21C ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34, Pasal 34A ayat (1) dan ayat (6), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (2A), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 45A ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50, dan/atau Pasal 51 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. |  |  |  |  |  |
| 1. OJK dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain dalam hal berdasarkan hasil pengawasan OJK dinilai kondisi Perusahaan membahayakan bagi pemegang polis atau peserta. |  |  |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa: |  |  |  |  |  |
| 1. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu; |  |  |  |  |  |
| 1. dihapus; |  |  |  |  |  |
| 1. larangan bagi Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali atau yang setara dengan pemegang saham dan/atau pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. larangan bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 56A |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan sanksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), OJK dapat: |  |  |  |  |  |
| 1. menurunkan penilaian tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 57 |  |  |  |  |  |
| Dihapus. |  | Dihapus. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 58 | \*dicabut POJK 22/2024 |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a atau huruf b dikenakan sanksi tambahan berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk setiap laporan. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi tambahan berupa denda administratif sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari dan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB XII |  |  |  |  |  |
| KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 59 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Penilaian terhadap Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan penandatanganan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat dilakukan oleh: |  |  |  |  |  |
| 1. pegawai Perusahaan yang memiliki sertifikat analis asuransi umum (*certified non-life analyst*) dari Persatuan Aktuaris Indonesia; atau |  |  |  |  |  |
| 1. konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan, paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 60 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dinyatakan tetap sah dan berlaku. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB XIII |  |  |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 61 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah tunduk pada Peraturan OJK ini. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 62 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan, perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR, dasar penilaian investasi dan bukan investasi, dan pembentukan penyisihan teknis dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal II |  |  |  |  |  |
| 1. Bagi Perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebelum Peraturan OJK ini berlaku: |  |  |  |  |  |
| 1. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) mulai berlaku sejak 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini ditetapkan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (5) huruf a untuk pertama kali disampaikan sebagai bagian dari laporan bulanan untuk periode yang dimulai 3 (tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini ditetapkan. |  |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada satu pihak atau beberapa pihak yang terafiliasi namun pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan, masing-masing paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi Dana *Tabarru’* ditambah Dana *Tanahud* dan 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Perusahaan, tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini berlaku; | Perusahaan yang melanggar ketentuan batasan investasi pada Pihak Terkait wajib menyesuaikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku. |  |  |  |  |
| 1. Penempatan investasi berupa pembiayaan syariah yang dijamin dengan hak tanggungan yang telah dimiliki Perusahaan, tetap diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan sampai jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang, dengan memenuhi ketentuan: | Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |  |  |  |
| 1. pembiayaan syariah tersebut diberikan kepada perorangan; |  |  |  |  |  |
| 1. pembiayaan syariah tersebut dijamin dengan hak tanggungan pertama; |  |  |  |  |  |
| 1. pembiayaan syariah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |  |  |  |  |  |
| 1. sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan disimpan oleh Perusahaan; |  |  |  |  |  |
| 1. besarnya setiap pembiayaan syariah paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan nilai jual objek pajak; dan |  |  |  |  |  |
| 1. pembatasan atas investasi berupa pembiayaan syariah yang dijamin dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal polis asuransi PAYDI dengan mata uang rupiah yang memiliki Subdana yang ditempatkan pada investasi luar negeri yang diterbitkan sebelum Peraturan OJK ini berlaku, Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi luar negeri dari Subdana tersebut namun Subdana tersebut tidak dapat dimiliki oleh pemegang polis atau peserta PAYDI dengan mata uang rupiah yang belum memiliki Subdana tersebut. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Subdana yang dibentuk sebelum Peraturan OJK ini berlaku terdapat investasi berupa reksa dana syariah yang memiliki aset yang mendasari (underlying asset) selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (5) Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi Subdana pada reksa dana syariah tersebut namun Subdana tersebut tidak dapat dimiliki oleh pemegang polis atau peserta baru yang belum memiliki Subdana tersebut. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang telah menempatkan investasi dengan melampaui batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait pada saat Peraturan OJK ini berlaku harus menyelesaikan pelampauan tersebut paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan OJK ini. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang telah menempatkan investasi atas aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk MTN Syariah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan/atau reksa dana penyertaan terbatas syariah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b sebelum Peraturan OJK ini berlaku, tidak harus menyesuaikan investasi pada MTN Syariah tersebut namun tidak diperkenankan menambah penempatan investasi pada MTN Syariah dan/atau reksa dana penyertaan terbatas syariah tersebut. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pada saat Peraturan OJK ini diundangkan, ketentuan mengenai laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107), dinyatakan tidak berlaku. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta |  |  |  |  |  |
| pada tanggal ... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Diundangkan di Jakarta |  |  |  |  |  |
| pada tanggal ... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| SUPRATMAN ANDI AGTAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... |  | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR…. |  |  |  |

**Perubahan Substansi :**

1. Penambahan Pasal 14 ayat (12)
2. Mengahapus Pasal 19 ayat (1) huruf n
3. Penambahan Pasal 20 ayat (1a)
4. Penambahan Pasal 20 ayatayat (7)
5. Menghapus Pasal 21 ayat (1) huruf j
6. Penambahan Pasal 21 ayat (1a)
7. Perubahan Pasal 21 ayat (5) huruf a
8. Penambahan Pasal 21B ayat (2) huruf d
9. Penambahan Pasal 21B ayat 4)
10. Perubahan Pasal 27 ayat (6)
11. Penambahan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)
12. Perubahan Pasal 34A ayat (1) huruf a
13. Menghapus Pasal 34A ayat (5)
14. Perubahan Pasal 35
15. Perubahan Pasal 38
16. Perubahan Pasal 56
17. Pencabutan Pasal 58 oleh POJK 22/2024 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian